



KORAN
TEMPO

www.korantempo.com | www.tempointeraktif.com
MAKASSAR



JUMAT

12 NOVEMBER 2010
EDISI NO. 3356
TAHUN X
48 HALAMAN
RP 3.000



**GAYUS SUAP POLISI RATUSAN JUTA
UNTUK BISA KELUYURAN TIAP PEKAN**

BERITA UTAMA »A1-A2

FLEXI
Lebih Irit Kan!

Supomo Guntur

WAKIL WALI KOTA MAKASSAR:

APARAT KORUP SAYA SIKAT

MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar Supomo Guntur akan mengecek sendiri perilaku aparatnya yang dianggap korup oleh lembaga survei dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya sudah mendapat perintah dari wali kota untuk menindaklanjuti temuan lembaga itu," ujar dia kemarin.

Menurut Supomo, perilaku korup aparatnya sudah keterlaluan. Sudah tak terhitung berapa kali diperingatkan agar mereka tidak main-main dengan tindak kejahatan itu, termasuk menekan pakta integritas bebas dari korupsi. "Kalau saya temukan aparat yang korupsi, langsung saya sikat," kata Supomo.

Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan tabiat buruk pegawai pemerintah kota dalam sebuah rekaman video. Dalam rekaman terungkap ada pegawai di sejumlah kantor dinas melakukan pungutan liar. Tak lama berselang, Lembaga Survei Indonesia merilis, sekitar 58 persen responden yang ditanya mengatakan perilaku pegawai Kota Makassar belum bersih dari korupsi. Berikutnya, Transparency International Indonesia mengumumkan bahwa Makassar termasuk kota terkorup.

Supomo menjelaskan, perintah Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin agar dibentuk tim independen guna mengevaluasi kinerja aparat harus dilaksanakan. Selain melibatkan elemen lembaga swadaya masyarakat, akademisi, media massa, dan Ombudsman, unsur pemerintah diikutsertakan. "Unsur pemerintah dimasukkan supaya tidak salah kaprah," kata dia.

Dia menambahkan, dalam mengevaluasi kinerja pegawai, tidak harus menunggu terbentuknya tim. "Tanpa tim independen, saya akan turun untuk melihat langsung," katanya sambil membantah kabar sudah terbitnya Surat Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim independen. "Salah kalau dibilang terbit. Bagaimana SK bisa terbit tanpa ada orang yang ditunjuk," ujar Supomo.

Informasi terbitnya surat keputusan itu datang dari Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Makassar Idris Patarai pada Rabu lalu. Idris bahkan menyebutkan sejumlah nama yang tercantum dalam surat keputusan Wali Kota. Di antaranya Syamsudin Alimsyah dari Komite Pemantau Parlemen dan Mulyadi Hamid dari Ombudsman.

Kemarin, Idris meralat keterangannya. Surat pembentukan tim independen memang belum terbit karena Wali Kota sedang beribadah haji. "Saya memang menyebut nama Mulyadi Hamid dan Syamsudin Alimsyah. Itu sebatas usulan saya," katanya. Sambil menunggu tim terbentuk, Idris melanjutkan, temuan lembaga survei akan dikonsultasikan kepada pemimpin instansi atau satuan kerja perangkat daerah. ● ARISTOFANI FAHMI

**SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN
BELUM TERBIT.**

Tiga yang Mencoreng

Kota Makassar belum terbebas dari citra buruk. Persepsi negatif publik terhadap aparat pemerintah kota yang suka menerima suap, gemar main pungut, serta kolusi, korupsi, dan nepotisme sulit dimungkiri. Dalam sebulan terakhir, tiga lembaga melansir keburukan itu. Meski sisi baik Makassar juga diumumkan, perilaku segelintir pegawai telah mencorengnya.

1. Sebuah rekaman video memperlihatkan praktek korupsi pegawai kantor dinas tata ruang dan bangunan, kantor pelayanan perizinan, dinas catatan sipil dan kependudukan, serta dinas perhubungan. Rekaman video ini dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi di Makassar pada 21 Oktober lalu.

2. Lembaga Survei Indonesia menilai kinerja satuan kerja perangkat daerah buruk. Mayoritas responden yang disurvei, yakni sekitar 58 persen, mengaku tak puas atas kinerja satuan kerja tersebut. Disimpulkan bahwa perilaku aparat yang korup masih terasa. Survei ini diumumkan di Makassar pada 3 November lalu.

3. Transparency International Indonesia menempatkan Makassar sebagai salah satu kota terkorup di negeri ini. Makassar berada di urutan ke-46 dari 50 kota yang disurvei, sedikit lebih baik dari Kota Surabaya, Cirebon, dan Pekanbaru.

- Untuk kawasan Sulawesi, masih menurut lembaga yang bertujuan memerangi korupsi itu, Makassar berada di peringkat paling rendah. Kota paling bersih dari praktek korupsi di Pulau Sulawesi adalah Gorontalo. Pengumuman itu berlangsung di Jakarta pada 9 November 2010.

● **BERITA TERKAIT HALAMAN 2**



EDI WAHYONO (TEMPO)